



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda No.72 Telp.0380- 821540,833650,826384

Facsimile: (0380) 833650 Pos-el: Parekraf@nttprov.go.id

Laman : www.parekraf.nttprov.go.id

K U P A N G

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN AKADEMIK DAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Hari/Tangga : Senin, 01 Agustus 2022
Waktu : 8.30 wita - selesai
Tempat : Ruang Kolbano - Hotel Kristal Kupang
Acara :

- Pembukaan / MC
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- Laporan Ketua Panitia
- Sambutan dan arahan Gubernur yang diwakili Ass.2
- Paparan penyampaian materi Rapat oleh Bapak Solidaman R. Plaituka, SH. M.Hum
- Perancang Peraturan Perundang Undangan Hukum dan Ham.
- Diskusi dan Pembahasan

1. Pimpinan Rapat : Yunus P. S. Bureni, SH. M.Hum Hasil Rapat : Menilai masalah di lapangan, serahkan ke Dinas Parekraf Prov. NTT

- Identifikasi
- Inventarisasi
- Kumpul bahan (Kab/Kota sebagai sample)
- Data pengolahan
- Pengembangan sistem Pemasaran
- Incubator surat
- Perlindungan kreatifitas
- Kerjasama (dalam dan luar negeri)
- Dalam negeri : dunia pendidikan – komunitas
- Luar negeri : difasilitasi (tidak ada di provinsi, sesuai perundang undangan.

2. Penghargaan

Belum muncul secara rinci tentang sub sektor surat masih

Masih umum (Bpk Rolland)

- Data belum konsisten
- Teknik penulisan dalam bahasa asing tapi ditulis kapital
- Tidak ada konsistennya, 16 sub sektor
- Aplikasi dan game developer, arsitektur, desain, interior, desain komunikasi visual
- Desain produk, fashion film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan,, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio
- Ranperda ttg pengembangan surat
- Devenisi ketentuan umum
- Gugus tugas dan pendataan
- Konsistensi antara judul/ perda dan lain lain

- Keppres 142-2019 sesuai dengan jumlah data yang beda

3. Penanggung :

1). Kadis Kominfo :

- Apresiasi kepada Disparekraf Prov. NTT dan teman teman di Kemenkumham
- Regulasi yang belum, tolong di harmonisasi
- Materi 12/2022 harus ada judulnya baru masuk Bab
- Landasan sosiologis menggambarkan tentang objek (urgensinya dan manfaatnya seperti apa)
- Pengembangan surat berbasis digitalisasi (dijabarkan)
- Evaluasi dan analisis (masukan perpres 23/2019)
- Pancasila harus dimasukkan semua
- Kajian injirik, masukan juga arsitektur pergub 72
- Dasar berbasis digital
- Belum dijelaskan urgensinya tentang digital gugus tugas, ekosistem digital belum diatur.
- Pemasaran berbasis digital belum ada.

2. Adi Mandala.

- Tambahan landasan ekonomi
- Tambahan landasan kultural
- Filosofi tidak sama dengan ideologis, jadi ideologis tidak bisa diturunkan dari filosofis
- Filosofi tidak berubah apalagi setiap saat bisa berubah
- Fokus perda
- Surat di sub sektor, di OKM 9 sub sektor usaha (dipilih biar konteks dan kontennya tidak bertabrakan/tumpang tindih)

3. Kadis Pariwisata Kota Kupang.

- Naskah Akademik sub sektor kriya ada ada di naskah Tiroso, dan lain lain
- Arsitektur moderen, ada teman teman di kota kupang dan yang di pisahkan antara Parekraf dan Koperasi (UMKM, surat/ Industri – Perindag)

4. Biro Hukum

Semoga bisa berproses di Kementerian sehingga bisa diterapkan Gubernur

- Perpres 142/2019 strategi atau Rencana Induk Pengembangan surat tahun 2016 – 2019

5. Kabid Industri Parekraf

- Muatan dikerjakan pada team ahli mengkonsistensi antara judul/ perda dan lain lain.
- Kepres 142/2019 sesuai dengan jumlah data yang beda
- Pemanfaatan produk lingkup 19/2019
- Sehingga ada sifat impenitativr dalam pengaturan sanksi

6. Pak Yunus

Setiap masukan diakomodir ada yang disesuaikan dengan perundang undangan

- Data
- Biaya

Anggaran tidak bisa dirubah karena nomenklatur kegiatan sub sektor surat pasal 10 ada 17. yang diatur adalah rencana aksi masing masing daerah sehingga tidak tumpang tindih data penting – aksi

Sebenarnya belum siap di seminarkan landasan filosofis, semangat cita cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam ideologi sekarang diatur ke perundang undangan jadi yang di surat no. 5

- Surat Masyarakat sosiologis lampiran 100 tahun 2019 tidak terkait dengan apa yang jadi permasalahan secara sosial merujuk tab II (5).
- Permasalahan yang dihadapi adalah data akan diperbaiki dalam UU yang dicantumkan hanya surat.
- Kalau seperti itu tidak perlu Perda
- Perda sifat delegatif sehingga tidak perlu dicantumkan ideologi, yuridis, dll.
- Yang menonjol sub sektor apa saja
- Rencana aksi disusun gugus tugas oleh Pemerintah Daerah ek
- Judul naskah sama dengan judul peraturan. Sesuaikan
- Pemakaian produk lokal – perda no. 24
- Keppres 87 tidak ada penerima kerja pihak ke 3.

Kesimpulan : dalam pelaksanaan Rapat Penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan ranperda ini menyajikan hasil pekerjaan yang masih nol (kosong), dimohon sumbangsih, saran guna Racangan peraturan naskah akademik, dimana naskah akademik harus sejalan atau konek dengan rancangan peratura daerah, Ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Ada beberapa data yang ketinggalan nanti akan disesuaikan.

Penutup oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Moderator : ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Terima kasih.

Kupang, 9 September 2022
N O T U L E N,

Maqrgaretha Erna Daud

FOTO KEGIATAN :



